



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 199 TAHUN 2021

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk merencanakan Program Pembentukan Peraturan Bupati Bantul secara terencana, terpadu, dan sistematis, perlu adanya perencanaan pembentukan Peraturan Bupati Bantul dalam bentuk Program Pembentukan Peraturan Bupati Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Bantul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 130);

Memperhatikan: Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/00122, tertanggal 11 Januari 2021, perihal Fasilitasi Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BANTUL TAHUN 2021.
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Bantul Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Bupati Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diubah dalam rangka :
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Bupati Bantul.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 April 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 199 TAHUN 2021
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
BUPATI BANTUL TAHUN 2021

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BANTUL TAHUN 2021

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	MATERI POKOK	PEMRAKARSA	STATUS	RENCANA PEMBAHASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pedoman Pemberhentian Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah	Ruang lingkup pemberhentian jabatan Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah meliputi: 1. Tata cara pemberhentian; dan 2. Jangka waktu persetujuan pemberhentian.	Bagian Administrasi Perekonomian	Baru	-	
2	Pemeriksaan dan Pengujian Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan	1. Obyek Pemeriksaan; 2. Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian; 3. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian; 4. Berita Acara Pemeriksaan dan Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan; 5. Rekomendasi Perbaikan; 6. Surat Keterangan Kelayakan Sistem Proteksi Kebakaran dan Sarana Penyelamatan; dan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baru	April 2021	

1	2	3	4	5	6	7
		7. Rekomendasi Persetujuan Pemasangan;				
3	Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1. Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan; 2. Relawan Pemadam Kebakaran; 3. Sarana dan Prasarana; 4. Standar Prosedur Operasional; 5. Pembinaan; dan 6. Pengawasan dan Pengendalian;	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baru	April 2021	
4	Kajian Resiko Bencana Kabupaten Bantul	Tindak Lanjut Hasil Kajian Resiko Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baru	Draft: Akhir Maret	
5	Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul Tahun 2019-2024	Pelaksanaan RPB oleh Instansi/Organisasi terkait	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baru	Draft: Akhir Maret	
6	Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tata Cara dan Mekanisme Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Baru	Tahun 2021	
7	Perubahan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan	Revisi Jenis Perizinan dan Kewenangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Perubahan	Tahun 2021	
8	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Tata Cara Perizinan; 2. Penerapan Sanksi Administrasi; 3. Tindak Lanjut Ijin Usaha Pemonudukan/Kos; 4. Ketentuan Mengenai Pelaksanaan Operasi Penegakan Trantibum; dan	Satuan Polisi Pamong Praja	Baru	Triwulan IV	

1	2	3	4	5	6	7
		5. Tata Cara Pemberian Laporan, Saran, Pertimbangan, dan Perlindungan Pelapor				
9	Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional Pendidikan bagi Satuan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah	1. Alokasi BOP; 2. Pengelolaan BOP; 3. Pertanggungjawaban BOP; 4. Larangan; 5. Monitoring; dan 6. Evaluasi dan Pengawasan.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Baru	Maret 2021	
10	Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama	1. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru; 2. Pelaksanaan PPDB; 3. Pembiayaan dan Pemantauan; dan 4. Pembinaan dan Pengawasan;	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Baru	Maret 2021	
11	Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan	1. Kriteria Penerima Insentif; 2. Pengajuan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pemberian Insentif; 3. Pembinaan dan Pengawasan; dan 4. Sanksi	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Baru	Maret 2021	
12	Jaminan Sosial	1. Kewajiban Perusahaan Mendaftarkan Pekerjaanya Dalam Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan atas Biaya Perusahaan sesuai Ketentuan yang Berlaku; 2. Peralihan Pekerja Peserta PBI ke PBJ; dan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Baru	Tahun 2022	

1	2	3	4	5	6	7
		3. Jaminan Kemudahan bagi Peserta PBI yang beralih ke PPU apabila di PHK dapat dikembalikan menjadi Peserta PBI.				
13	Hubungan Industrial	1. Pelarangan Penahanan Ijazah bagi Pekerja di Perusahaan; 2. Kewajiban Perusahaan; 3. Kriteria Perusahaan yang Dikecualikan; 4. Kewajiban Perusahaan untuk Mengatur Uang; 5. Lebih dari satu Subjek Pengusaha dalam Perjanjian Kerja; dan 6. <i>Memorandum of Understanding Outsourcing</i> dan/atau Perjanjian Kerja.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Baru	Tahun 2022	
14	Mekanisme Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai Pendapatan Daerah yang berupa Retribusi	Mekanisme Pembayaran Dana Kompensasi/ Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Baru	Tahun 2022	
15	Pelatihan Kerja dan Produktivitas	1. Pelatihan Kerja; 2. Kelembagaan Pelatihan; 3. Pemagangan Dalam Negeri; dan 4. Pelayanan Produktivitas.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Baru	Tahun 2022	
16	Perizinan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja)	Tata Cara Perizinan Dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Baru	Tahun 2022	
17	Pendayagunaan Fasilitas BLK (Balai Latihan Kerja)	1. Jenis Program Pelatihan Kerja; 2. Prosedur Pemanfaatan Fasilitas Latihan Kerja; 3. Hak dan Kewajiban UPTD BLK; dan 4. Pelaksanaan retribusi: a. Nama, objek, subjek, dan wajib retribusi, golongan retribusi;	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Baru	Tahun 2022	

1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> b. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa; c. Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; d. Wilayah pemungutan; e. Masa retribusi dan saat retribusi terutang; f. Tata cara pemungutan retribusi; g. Tata cara pembayaran; dan h. Keringan, pengurangan, atau pembebasan retribusi. 				
18	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	<ul style="list-style-type: none"> 1. Susunan Organisasi; dan 2. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas 	Dinas Pariwisata	Perubahan	-	
19	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme Penyelenggaran BKK; dan 2. Ketentuan Penyelenggara dan Penyelenggaran BKK dari tingkat Kabupaten sampai Desa. 	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru	Maret 2021	

1	2	3	4	5	6	7
20	Bantuan Keuangan Pembangunan Parsitipatif Masyarakat Desa (P2MD)	1. Mekanisme Penyelenggaraan P2MD; dan 2. Ketentuan Penyelenggara dan Penyelenggaraan P2MD dari Tingkat Kabupaten sampai Desa.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru	Maret 2021	
21	Pemberdayaan Pedukuhan	1. Mekanisme Penyelenggaraan; dan 2. Ketentuan Penyelenggara dan Penyelenggaraan dari Tingkat Kabupaten sampai Desa;	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru	Maret 2021	
22	Rincian Dana Desa	1. Pedoman Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa; 2. Prioritas Penggunaan Dana Desa; 3. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa; 4. Publikasi dan Pelaporan; dan 5. Pembinaan.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru	September 2021	
23	Pembangunan Keluarga		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru	Juli 2021	

1	2	3	4	5	6	7
24	Kampung Keluarga Berkualitas		Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru	Juli 2021	
25	Sinkronisasi Program dan Kegiatan APBKal dan APBD	Program dan Kegiatan Kalurahan yang sesuai dengan Kewenangannya agar Selaras dengan Program dan Kegiatan Kabupaten	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	Baru	Oktober 2021 sebelum jadwal penyusunan APBKal	
26	Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	Pedoman Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	Baru	Juni 2021	
27	Pedoman Penyusunan RKP/RPJM Kalurahan	Proses dan Sistematisa Penyusunan	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	Baru	April 2021	
28	Pedoman Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Kalurahan	Penyederhanaan pelaksanaan lomba tingkat Kabupaten di Kalurahan sehingga semua jenis Lomba tingkat Kabupaten yang harus diikuti oleh Kalurahan dapat dilaksanakan dalam satu waktu, seperti Lomba Kalurahan, Lomba PKK, Lomba Posyandu, Lomba LPMD, dan Lomba Karang Taruna.	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	Baru	September 2021	
29	Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa	Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa agar Sinkron dengan Peraturan-Peraturan Terkait	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	Baru	Desember 2021	

1	2	3	4	5	6	7
30	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	1. Pengelolaan Sampah di Tingkat Rumah Tangga (membuang sampah sembarangan) 2. Pengaturan tentang Denda dan Teknisnya	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	Baru	Agustus 2021	
31	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
32	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
33	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
34	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
35	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
36	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	

1	2	3	4	5	6	7
37	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
38	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
39	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
40	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
41	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
42	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	

1	2	3	4	5	6	7
43	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
44	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Pangan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
45	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
46	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
47	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	

1	2	3	4	5	6	7
48	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
49	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
50	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
51	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
52	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
53	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	

1	2	3	4	5	6	7
54	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
55	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
56	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
57	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Kalurahan Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
58	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
59	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup; UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan	Bagian Organisasi	Baru	Oktober	

1	2	3	4	5	6	7
60	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Pangan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD Balai Benih Pertanian; 2. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan; 3. UPTD Balai Budidaya Perikanan; 4. UPTD Rumah Potong Hewan; dan 5. UPTD Pusat Kesehatan Hewan 	Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
61	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD Rusunawa, Sanitasi, dan Pemakaman; dan 2. UPTD Pengamatan Pengairan 	Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
62	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul	UPTD Balai Latihan Kerja	Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
63	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. UPTD Jaminan Kesehatan Daerah; 3. Laboratorium Kesehatan Daerah; dan 4. UPTD RSUD Panembahan Senopati 	Bagian Organisasi	Baru	Oktober	

1	2	3	4	5	6	7
64	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul	1. UPTD Pasar; dan 2. UPTD Metrologi	Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
65	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
66	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul	UPTD Pusat Kesehatan Sosial	Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
67	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	1. UPTD Satuan Pendidikan; dan 2. Sanggar Kegiatan Belajar	Bagian Organisasi	Baru	Oktober	
68	Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	November	
69	Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	November	

1	2	3	4	5	6	7
70	Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul		Bagian Organisasi	Baru	November	
71	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama	Tindak Lanjut atau amanat pasal per pasal dalam Perda meliputi zona kawasan ketinggian menara	Dinas Komunikasi dan Informatika	Baru	Maret 2021	
72	Pengujian Kendaraan Bermotor	Aspek Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	Baru	Triwulan IV	
73	Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Perdesaan di Kabupaten Bantul	Jaringan Trayek Angkutan Perdesaan di Kabupaten Bantul	Dinas Perhubungan	Baru	Triwulan IV	
74	Tarif Dasar, Tarif Jarak Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Angkutan Perdesaan Menggunakan Kendaraan Umum di Kabupaten Bantul	Tarif Dasar, Tarif Jarak Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Angkutan Perdesaan Menggunakan Kendaraan Umum di Kabupaten Bantul	Dinas Perhubungan	Baru	Triwulan IV	
75	Tata Cara Pengelolaan Restribusi Tempat Khusus Parkir	Tata Cara Pengelolaan Restribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan	Baru	Triwulan IV	
76	Tata Cara Pengelolaan Restribusi Parkir Tepi Jalan Umum	Tata Cara Pengelolaan Restribusi Parkir Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	Baru	Triwulan IV	
77	Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	Pengaturan Tata Kelola Rumah Sakit	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	Baru	Juli 2021	

1	2	3	4	5	6	7
78	Tarif Layanan Kesehatan	Pengaturan Tarif Layanan Kesehatan dan Layanan Kesehatan Lainnya	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	Baru	September 2021	
79	Perubahan Tarif Layanan Kesehatan	Perubahan Pengaturan Tarif Layanan Kesehatan dan Layanan Kesehatan Lainnya	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	Baru	Maret 2021	
80	Mekanisme Penatausahaan Keuangan	Pengaturan Mekanisme Penatausahaan Keuangan Unit Organisasi Bersifat Khusus	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	Baru	Juli 2021	
81	Mekanisme Pengelolaan Kepegawaian	Pengaturan Mekanisme Pengelolaan Kepegawaian Unit Organisasi Bersifat Khusus	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	Baru	Juli 2021	
82	Jasa Pelayanan dalam Sistem Remunerasi	Pengaturan Jasa Pelayanan Dalam Sistem Remunerasi	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	Baru	Agustus 2021	
83	Pengelolaan Pegawai dan Pegawai Negeri	Pengaturan Pengelolaan Pegawai Non PNS BLUD	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	Baru	Agustus 2021	
84	Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah	Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa BLUD	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	Baru	Oktober 2021	
85	Rencana Strategis Pengelolaan BLUD	Rencana Strategis Pengelolaan BLUD	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	Baru	Agustus 2021	

1	2	3	4	5	6	7
86	Standar Pelayanan Minimal BLUD	Standar Pelayanan Minimal BLUD	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	Baru	November 2021	
87	Mekanisme Pengajuan utang/pinjaman jangka pendek	Perubahan Pengaturan Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	Baru	November 2021	
88	Pengelolaan Investasi BLUD	Pengaturan Pengelolaan Investasi BLUD	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	Baru	September 2021	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH